

OPTIMALISASI PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

Djamil Hasim¹, Yanes Mirino², Rijal³

Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik YAPIS Biak, Biak Numfor, Indonesia^{1,2,3}

E-mail: djamilhasim1964@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui optimalisasi penggunaan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) di Kabupaten Biak Numfor. Metode penelitian ini menggunakan teknik studi kasus dengan penelitian deskriptif kualitatif, Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah wilayah Biak Numfor belum diterapkan secara optimal dimana pada indikator Kualitas Sistem yang belum memadai dimana sarana yang ada belum memadai sehingga menjadi faktor terhambatnya proses pengelolaan keuangan daerah, pada indikator Kualitas Informasi terlihat sudah cukup baik namun masih perlu dilakukan pembenahan agar akurasi dan tepat waktu dalam penyampain informasi yang lebih optimal, pada indikator Kualitas Layanan terlihat belum optimal disebabkan kurangnya dukungan kualitas jaringan dalam penggunaan sistem informasi keuangan daerah, kemudian indicator Kepuasan Pengguna terlihat sudah cukup optimal karena dengan mudah dapat diakses dan direpson, ini berdasarkan pengalaman yang dimiliki sebelumnya dalam menjalankan sistem aplikasi yang ada.

Kata Kunci: *Optimalisasi, Sistem Informasi, Keuangan Daerah.*

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the optimization of the use of the regional financial information system (SIKD) at the Regional Financial Management Agency (BPKD) in Biak Numfor Regency. This research method uses a case study technique with qualitative descriptive research, data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques include data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the Regional Financial Information System at the Regional Financial Management Agency in the Biak Numfor region has not been implemented optimally where the System Quality indicator is inadequate

where the existing facilities are inadequate so that it becomes a factor hindering the regional financial management process, on the Information Quality indicator it appears sufficient. However, improvements still need to be made so that the accuracy and timely delivery of information is more optimal, the Service Quality indicator is seen to be not optimal due to the lack of network quality support in the use of regional financial information systems, then the User Satisfaction indicator is seen to be quite optimal because it is easily accessible and responded, this is based on previous experience in running existing application systems.

Keywords: *Optimization, Information Systems, Regional Finance*

PENDAHULUAN

Pemerintahan Kabupaten Biak Numfor sebagai bagian dari pemerintahan daerah di Indonesia tepatnya di Provinsi Papua menjadi bagian dari pemerintahan daerah yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan efektif. Oleh sebab itu dalam era digitalisasi, dengan seiring berkembangnya teknologi maka proses pelayanan diwajibkan berubah sesuai dengan konteks zaman yang ada, sehingga menjadi aspek penentu bahwa sebuah pelayanan akan berjalan dengan baik jika teknologi bisa dilakukan dengan baik berdasarkan sistem yang ada. Oleh sebab itu salah satu yang menjadi penentu dalam membenahi pelayanan itu adalah bagaimana penggunaan sistem informasi keuangan daerah menjadi sangat penting untuk mendukung kegiatan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Biak Numfor

Lanjut yang dikatakan (Rustina, 2018) bahwa Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang dibuat dengan memanfaatkan teknologi informasi, dibuat sedemikian rupa

sehingga dapat digunakan untuk menghimpun, mengolah, menyajikan, dan menjadi referensi data dan informasi keuangan daerah, serta untuk memudahkan komunikasi antara Kementerian Keuangan, pemerintah daerah dan pemilik atau pengguna informasi keuangan daerah lainnya.

Pada konsep di atas dapat digambarkan bahwa dengan memanfaatkan teknologi, pemerintah dapat berfungsi secara terintegrasi dengan akses antar unit kerja dengan menciptakan jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja agar proses pengelolaan data berbasis aplikasi dapat menjadi solusi yang baik untuk meningkatkan kinerja pegawai secara kolektif dan berkesinambungan sehingga menimbulkan tingkat yang optimal dalam penggunaan sistem informasi keuangan daerah di Kabupaten Biak Numfor.

Jika diamati secara umum penggunaan sistem informasi keuangan daerah di Kabupaten Biak Numfor masih terdapat beberapa kendala dalam penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dalam menyediakan laporan keuangan yang

efektif sehingga hal tersebut memberikan pengaruh kepada daerah-daerah yang lain. Beberapa kendala yang terjadi, seperti permintaan dari Organisasi Perangkat Daerah yang ada belum bisa menerbitkan surat persediaan Dana (SPD) pada bidang anggaran salah satu faktornya karena aplikasi belum bisa di gunakan dengan baik, disamping itu sumber daya manusia atau pegawai yang ada belum memahami secara jelas terkait aplikasi yang digunakan sehingga kondisi ini terjadi karena aplikasi yang disediakan dari pusat belum berjalan secara maksimal. Menurut Jogiyanto (dalam Pirade et al., 2013) sekalipun kualitas sistem informasi telah meningkat, masih banyak sistem informasi yang tidak pernah diterapkan. Hal ini karena pengguna menolak untuk menggunakannya atau tidak mau.

Oleh karena keuangan daerah merupakan salah satu faktor yang juga mempengaruhi efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka Kabupaten Biak Numfor sangat berperan penting dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah, khususnya kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tugas masing-masing perangkat daerah akan terbantu dengan pengelolaan keuangan yang baik. Setiap Perangkat Daerah menetapkan suatu indikator yang menjadi ukuran kinerja yang akan dilaksanakan, begitu juga dengan

BPKAD Kabupaten Biak Numfor menetapkan indikator yang digunakan sebagai alat ukur kinerja pelayanan yang disebut Indikator Kinerja Kunci (IKK). Penetapan indikator kinerja disetiap perangkat daerah dapat mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai indikator kinerja pelayanan pemerintah, indikator SDG's, Standar Pelayanan Minimal (SPM), ataupun indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah maupun muatan lokal. Indikator kinerja BPKAD Kabupaten Biak Numfor dalam kurun waktu terus mengalami perubahan, hal ini disebabkan adanya perubahan RPJMD Pemerintah Kabupaten Biak Numfor yaitu dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 16 Tahun 2014.

Meskipun BPKAD Kabupaten Biak Numfor mengalami banyak kesulitan dalam menjalankan kewajiban dan melaksanakan kegiatannya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, Namun permasalahan ini harus dilihat sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Pelayanan sedang dikembangkan oleh BPKAD Kabupaten Biak Numfor. Pengelolaan keuangan dan aset di masa depan akan menghadapi beberapa tantangan, namun tantangan yang paling penting adalah dinamika pembangunan regional yang pesat akibat perubahan global yang tidak dapat dihindari di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Seiring dengan

perkembangan internasional ini, sejumlah kebijakan provinsi dan federal telah diperkirakan. Kebijakan tersebut tentu saja membawa dampak bagi pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor. Hal ini dilakukan untuk memastikan berbagai program dan kegiatan terlaksana secara selaras dan satu sama lain.

Hal ini dapat digambarkan pada permasalahan yang ada seperti Kualitas pegawai yang belum memadai, pengelolaan sumber daya manusia yang tidak konsisten atas uang dan aset lokal. Jumlah pegawai di BPKAD masih rendah, dan sistem serta proses pengelolaan keuangan dan barang daerah belum dilaksanakan secara maksimal sehingga menimbulkan aspek permasalahan yang harus diselesaikan berdasarkan ancaman, termasuk dinamika perubahan kebijakan pemerintah pusat yang berdampak pada pengelolaan keuangan dan barang daerah, terdapat kesenjangan dalam cara pengawas, pemeriksa, dan pengelola memandang atau menafsirkan kebijakan pengelolaan keuangan dan barang daerah. Ada pula jaringan teknologi informasi, kesenjangan sarana dan prasarana antar pegawai daerah, serta adanya rotasi/mutasi sumber daya manusia antar pegawai daerah.

Selain itu, kendala dalam penyusunan laporan keuangan daerah juga banyak disebabkan oleh rendahnya kemampuan aparatur dalam melakukan perencanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan di

daerah. serta adanya perubahan petugas keuangan yang disebabkan oleh promosi, mutasi, maupun rotasi. Permasalahan lain yang menghambat penyusunan Laporan Keuangan adalah belum optimalnya Pengelolaan barang milik daerah, hal ini terlihat dari belum akuratnya data yang disajikan pada neraca Perangkat Daerah. Karena neraca merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini menyebabkan tertundanya penyusunannya.

Berdasarkan gambaran permasalahan diatas maka perlu dilakukan kajian untuk menemukan sebuah solusi dan masukan agar dapat menjadi referensi bagi pemerintah dan masyarakat agar pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dilaksanakan dengan optimal. oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian dan optimalisasi penggunaan SIKD untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Biak Numfor.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Optimalisasi

Menurut Winardi (dalam Wahyuningtyas, 2018) salah satu ukuran yang mengarah pada pencapaian tujuan adalah optimasi. Secara umum, optimasi adalah pencarian nilai terbaik dari serangkaian fungsi yang disediakan dalam suatu konteks. Menurut Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia

(dalam Hidayat & Irvanda, 2022) Optimalisasi merupakan suatu teknik, cara, atau kegiatan yang optimal. Membuat keputusan terbaik, tertinggi, atau paling menguntungkan dikenal dengan istilah mengoptimalkan. yang dimaksud dengan “optimasi” adalah “pencapaian hasil sesuai yang diinginkan, dengan demikian optimalisasi adalah pencapaian hasil sesuai antisipasi secara efektif dan efisien”.

Singiresu S Rao, John Wiley dan Sons (dalam Hidayat & Irvanda, 2022) Proses mendapatkan kondisi yang menghasilkan nilai maksimum atau minimum suatu fungsi adalah definisi lain dari optimasi.

Tidak selalu mungkin untuk mendapatkan keuntungan tertinggi jika tujuan utamanya adalah memaksimalkan keuntungan atau biaya terendah jika tujuan sekundernya adalah mengurangi biaya. Menemukan solusi terbaik adalah proses optimasi.

Konsep Sistem Informasi

Kata "sistem" berasal dari kata Yunani "systema", yang berarti "keseluruhan yang terdiri dari banyak bagian" dan "hubungan yang terjadi antar komponen secara teratur". Sistem adalah kumpulan bagian atau elemen yang saling berhubungan yang memungkinkan terjadinya aliran material, informasi, dan energi. (Desrinelti et al., 2021)

Suatu sistem adalah puncak dari sejumlah komponen yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan

tertentu. (Rachmawati et al., 2018). Sistem informasi adalah sistem buatan manusia yang dirancang untuk mengumpulkan, mengelola, dan mengeluarkan data kepada pengguna. Seringkali terdiri dari kombinasi komponen manual dan berbasis komputer.

Sebagaimana dijelaskan Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 127 ayat (4) menjelaskan bahwa Sistem Informasi yang dimaksud ayat (1) dan (2) berbasiskan teknologi informasi yang mudah diaplikasikan, mudah di akses, dan memiliki sistem keamanan yang dipercaya (Krisbintoro Sigit et al., 2020). Lanjut Hal ini konsisten dengan era baru yang dihadirkan oleh teknologi informasi dan sistem informasi pada sektor publik. Untuk meningkatkan produktivitas pegawai, pemerintah akan menggunakan perangkat keras komputer, perangkat lunak, dan teknologi komunikasi.

Menurut DeLone dan McLean (dalam Muharsyah & Ekawati, 2022) “Kualitas informasi memiliki atribut seperti informasi yang diperoleh dari suatu sistem, keakuratan, relevansi informasi, ketepatan waktu, dan kelengkapan informasi,” menurut penelitian. “Kualitas informasi berkaitan dengan penggunaan sistem, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih.” Kualitas Informasi sering kali menjadi komponen penting dalam metrik kepuasan pengguna akhir.

DeLone & McLean (dalam Husrizalsyah & Pramana, 2020) secara khusus ajukan sejumlah kriteria tertentu, seperti apakah keluaran sistem informasi akan menghasilkan informasi berkualitas tinggi, untuk menentukan sistem mana yang lebih efektif. Model keberhasilan sistem yang diperoleh dari penyelidikan empiris setidaknya telah diuji dalam sejumlah penelitian. Telah banyak model pengukuran sistem informasi yang dihasilkan; penting untuk disadari bahwa mereka sering diuji dan mendapat perhatian lebih dari para peneliti. Karena permasalahan perilaku terkait langsung dengan elemen teknologi, model ini semakin populer karena menggunakan konsep yang mudah dipahami. Dijelaskan lebih lanjut bahwa faktor-faktor yang menentukan keberhasilan suatu pengukuran sistem informasi meliputi kepuasan pengguna akhir (*end user satisfaction*), kualitas layanan (*service quality*), kualitas sistem informasi (*system quality*), kualitas informasi (*information quality*), intensitas penggunaan sistem informasi (*use*), dampak organisasi (*organizational impact*), dampak individu (*individual impact*).

Sistem Informasi Keuangan Daerah

Sebagaimana dinyatakan (Budiriyanto, 2013) bahwa Sistem Informasi Keuangan Daerah yang disebut juga SIKD dijelaskan dalam PP No. 56 Tahun 2005 pasal 1 angka 15 sebagai suatu sistem yang mengumpulkan, mengelola, dan

mentransformasikan informasi tentang pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi data yang disediakan untuk kepentingan daerah. masyarakat dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Mengatur, melaksanakan, dan mengungkapkan keputusan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Sistem informasi keuangan daerah adalah suatu sistem yang menghimpun, memelihara, dan mentransformasikan data pengelolaan keuangan daerah dan sumber-sumber terkait menjadi informasi yang dapat diakses oleh masyarakat dalam rangka penyelenggaraan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan. (Hanriani, 2019)

Menurut Ismi (dalam Abdul, 2021) Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang dibuat oleh BPKP merupakan salah satu alat untuk membantu pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya. Oleh karena itu penerapannya berupa Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang digunakan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi penegakan berbagai peraturan di bidang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, antara lain keekonomian, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan auditabilitas.

Keuangan Daerah

Keuangan Daerah menurut (Moses & Ariadi, 2017) adalah mencakup segala bentuk kekayaan yang

berkaitan dengan hak dan kewajiban daerah, dan semuanya dilindungi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurut Glen A. Welsch, et.al (dalam Muh Hidayat B, 2022) mengatakan bahwa keuangan publik adalah studi tentang bagaimana anggaran mempengaruhi perekonomian, khususnya bagaimana anggaran mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan ekonomi yang penting seperti pertumbuhan, stabilitas, pemerataan dan efisiensi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, keuangan daerah secara umum diartikan sebagai segala hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinyatakan dalam uang, termasuk segala jenis uang. keuangan daerah. Menggunakan Kerangka Pendapatan dan Belanja Daerah, kekayaan. (Fedinant, 2020).

METODE

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah di Kabupaten Biak Numfor, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dan metodologi studi kasus. Sebagaimana dikemukakan oleh Moleong (2012:6) Melalui penggunaan bahasa, latar alam, dan teknik ilmiah lainnya, penelitian kualitatif berupaya memahami peristiwa

yang dialami partisipan penelitian secara holistik. Tujuan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk memudahkan penulis memperoleh data yang asli dan dapat dipercaya melalui Observasi, Wawancara, dan dokumentasi. Teknik Analisis Data Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif, dengan menggunakan analisis data model Analisis menggunakan model interkatif Miles, Huberman dan Saldana (dalam Arma et al., 2023) yang terdiri atas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Ada empat alur yang digunakan ketika menganalisis data kualitatif yaitu *Data Collection, Data Condensation, Data Display, dan Concluding Drawing/Verification*. Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa setiap tahapan proses dilakukan untuk memperoleh keabsahan data dengan melihat seluruh informasi yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber, antara lain penelitian lapangan lainnya, dokumen pribadi, dokumen resmi, foto, dan lain-lain. sumber lain diperoleh melalui metode wawancara dan didukung dengan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berbicara konsep Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah sistem penyimpanan, pengelolaan, dan pengolahan data pengelolaan informasi keuangan daerah serta data terkait untuk disajikan kepada

masyarakat dan digunakan sebagai alat pengambilan keputusan dalam pelaksanaan, pelaporan, dan pelaksanaan. merupakan tanggung jawab regional. Namun fokus kajian ini adalah pada metodologi untuk mengkaji permasalahan yang ada dan bagaimana menilai tingkat optimalisasi pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah federal kepada pemerintah kabupaten Biak Numfor.

Berdasarkan kekuatan dan keterbatasan kawasan, mengidentifikasi strategi pembangunan yang harus diterapkan di kawasan, negara, dan kawasan. Metrik keuangan digunakan untuk menunjukkan kinerja yang harus dicapai dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan memegang peranan penting dalam memaksimalkan sistem informasi keuangan daerah. Oleh karena itu, perencanaan berdampak pada seberapa besar pengelolaan yang diperlukan dan apa yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor. Total untuk mencapai tujuan dalam melaksanakan prosedur perhitungan keuangan daerah dengan aplikasi yang sekarang digunakan dalam sistem keuangan. Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Biak Numfor ditemukan sudah optimal berdasarkan kajian teori dengan melihat indikator yaitu Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, Kualitas Pelayanan, dan Kepuasan Pengguna Terhadap Dispatch yang Ada. Oleh

karena itu, penulis memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan dengan menganalisis secara menyeluruh berdasarkan permasalahan yang ada. Hal tersebut juga merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam optimalisasi penggunaan sistem keuangan daerah dikabupaten biak numfor berdasarkan rujukan teori yang dijadikan rujukan yakni teori DeLone & McLean (dalam Husrizalsyah & Pramana, 2020), maka dapat digambarkan hasil penelitian ini.

1. Kualitas Sistem

Dalam sebuah proses untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran yang ingin dicapai maka hal tersebut akan didukung dengan akses yang cepat dan akuratnya sebuah pekerjaan, olehnya itu seorang pegawai pemerintah harus mampu beradaptasi secara berkesinambungan dengan perkembangan teknologi agar mereka lebih memahami konteks sebuah pekerjaan yang bisa dicapai dengan baik dan akurat, salah satu aspek yang paling penting diperhatikan adalah ketika dalam memulai sebuah pekerjaan dalam administrasi saat ini yakni menunjuk pada aspek teknologi sistem yang akan digunakan, seperti memahami sistem tersebut dengan melihat apakah mudah dilakukan atau digunakan dalam menyelesaikan pekerjaan.

Pengembangan Kualitas Sistem dalam menjalankan optimalisasi penggunaan aplikasi keuangan daerah Kabupaten Biak Numfor belum terlihat optimal karena dipengaruhi kualitas

sumber daya manusia sebagai dimensi pada penempatan pegawai dengan pendidikan serta pengalaman yang mereka kerjakan. Perubahan siklus pengendalian manajemen di pemerintah daerah, semuanya merupakan bagian dari proses perubahan seperti pembentukan strategi, perencanaan strategis, penganggaran dan akuntabilitas, dan mekanisme *reward and punishment system*. Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam menerapkan strategi yang akan digunakan dalam penggunaan aplikasi SIKD mempunyai keterkaitan dengan kemampuan pengalaman kerja pada bidang pekerjaan yang mereka kerjakan sehingga berpengaruh sejauh mana kualitas sistem yang akan digunakan. hasil wawancara dengan informan IAM mengatakan:

“Saya pikir, kualitas sistem sudah baik namun masih perlu dilakukan perbaikan agar proses perhitungan keuangan dan pelaporan keuangan dapat berjalan dengan baik”

Sependapat apa yang diungkapkan oleh Informan RA mengatakan :

“kalau kami lihat aplikasi ini belum berjalan dengan normal dan baik karena sistem yang ada belum bisa dibuka, itu yang menjadi kendala bagi kami terus kalau masalah”

Berdasarkan Informasi diatas dapat dianalisis bahwa kualitas sistem sangat mempengaruhi tingkat penggunaan yang dialami oleh sumber daya yang ada artinya apa bahwa

semakin bagus sistem yang ada maka semakin baik pula, khusus bagi pegawai yang diberi tanggung jawab tersebut dimanfaatkan. Selain itu, kemampuan pengguna yang dibutuhkan organisasi merupakan prosedur yang sangat penting dalam mengevaluasi kualitas sistem karena orang yang tepat di tempat yang tepat akan dapat membantu mencapai hasil yang diinginkan. Disamping itu dalam jika dilihat kemampuan sumber daya manusia dalam menggunakan aplikasi belum terlihat optimal,hal ini didasarkan kemampuan pegawai dalam menguasai IT belum begitu baik.

Olehnya itu sebagai kesimpulan, kualitas sistem pelayanan dalam penggunaan optimalisasi penggunaan aplikasi SIKD menjadi acuan untuk melihat seberapa besar keberhasilan dalam menjalankannya dengan melihat aspek SDM yang ada, sehingga dalam pengelolaan keuangan daerah dapat teroptimaslisasi dalam penggunaannya. Sejalan dengan pendapat Noviyanti (dalam Husrizalsyah & Pramana, 2020) mengklaim bahwa kualitas sistem memiliki dampak yang signifikan terhadap seberapa baik suatu sistem digunakan. Oleh karena itu, hubungan antara kualitas dan pengguna secara psikologis dapat memotivasi keinginan untuk menggunakan sistem. Pengguna memang memengaruhi penggunaan, dan penggunaan memengaruhi pengguna, namun orientasi kualitas harus memainkan peran penting dalam kedua variabel tersebut. Pengguna

sistem yang setia dan berperilaku baik akan frustrasi jika sistem tidak didukung oleh luaran (output) informasi berkualitas tinggi juga.

2. Kualitas Informasi

Salah satu komponen terpenting dalam membantu perkembangan organisasi adalah sistem informasinya. Untuk memberitahukan kepada masyarakat umum tentang keuangan daerah, suatu instansi pemerintah menggunakan sistem informasi keuangan daerah, yaitu sistem informasi berbasis komputer. Salah satu komponen penting dari sistem informasi yang baik adalah perangkat keras komputer.

Untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah, sumber PAD perlu dioptimalkan dalam hal ini. Oleh karena itu, penting untuk memperluas tema dan sumber pendapatan. Upaya jangka pendek yang paling cepat dan sederhana adalah dengan mengintensifkan aset atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada, khususnya melalui pemanfaatan teknologi informasi. Output PAD dapat ditingkatkan tanpa penambahan sumber atau item baru yang memerlukan tambahan waktu, tenaga, dan penelitian untuk membangunnya. Sistem pengelolaan keuangan yang ada saat ini cenderung dibawah standar, sehingga dukungan teknologi informasi yang terintegrasi sangat diperlukan untuk meningkatkan pendapatan daerah bagi kabupaten-kabupaten pemekaran. Kemungkinan besar informasi yang diberikan tidak

konsisten, versi data berbeda, dan data kedaluwarsa karena masalah ini tercermin dalam sistem, kurangnya gadget teknis, dan jumlah sistem yang masih ada. hanya beroperasi sebagian. Sistem pengelolaan keuangan daerah mempunyai permasalahan yang cukup banyak, misalnya: baik dari segi data wajib pajak/retribusi, perhitungan besaran pajak, jumlah tagihan pajak, dan tujuan penyediaan pajak yang tidak optimal, sehingga perlu perangkat komputer yang baik agar optimalisasi dalam penggunaan aplikasi keuangan daerah bisa tercapai dengan baik. Hasil informasi informan bapak YHA mengatakan:

“Kalau menurut kualitas informasi disini belum cukup baik yang telah disiapkan dalam mendukung kerja sistem SIKD ini. Yach seperti komputer ini yang setiap staff masih perlu ditambahkan”

Informasi diatas menunjukan bahwa kualitas informasi sangat dibutuhkan dilihat pada aspek ketepatan waktunya, namun hal tersebut menunjukkan bahwa tepat waktu dalam menerima informasi masih terkendala pada sarana seperti akses jaringan internet sehingga hal tersebut sangat mempengaruhi optimalisasi dalam penggunaan sistem informasi pada Keuangan daerah kabupaten biak numfor. Disamping itu informasi yang diterima kadang terlambat sehingga respon yang diterima oleh pegawai juga mengalami kendala. Hal ini dilihat

berdasarkan Informasi YHA mengatakan: mengoptimalkan sistem yang ada dapat tercapai dengan baik.

“iya terkadang informasi yang kami terima itu tidak tepat, padahal datanya sudah dibutuhkan, ya kendalanya ini biasa faktor jaringan kemudian biasa juga sistem lagi error”

Hasil Informasi diatas dapat dianalisa bahwa kualitas informasi sangat berpengaruh besar pada dimensi tepat waktu dalam menerima informasi itu sangat dibutuhkan karena ada yang sifatnya mendesak untuk dibutuhkan, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi bahwa kualitas informasi itu sangat di dukung dengan akses jaringan internet, kemudian sistem yang ada dalam keadaan stabil ketika dibutuhkan. Sebagai kesimpulan bahwa kualitas informasi dalam optimalisasi penggunaan sistem informasi di keuangan daerah kabupaten biak numfor dalam perangkat teknologi sangat mendukung untuk melihat sejauh mana kualitas sistem informasi yang ada untuk dijadikan indikator keberhasilan dalam optimalnya dalam pengelolaan keuangan daerah di kabupaten biak numfor, namun dilihat kondisi yang ada pada aspek tersebut belum optimal karena peralatan teknologi yang tersedia belum memadai. Artinya apa bahwa ketika perangkat yang dibutuhkan tersedia maka kualitas informasi yang akan didapatkan akan cepat diterima sehingga hal tersebut mempengaruhi bahwa kualitas sistem berjalan dengan baik karena tingkat penggunaan dalam

3. Kualitas Layanan

Dari segi pelayanan, Kabupaten Biak Numfor masih sangat kurang terlayani khususnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Sistem pelayanannya lemah dalam hal ini karena belum banyak masyarakat yang bisa memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Sebab, sumber daya manusia di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak masih belum mencukupi untuk mengelola hal tersebut. Kemudian masalah yang selanjutnya adalah akses jaringan yang kurang memadai dalam melakukan pelayanan berbasis aplikasi yang membantu pengelolaan keuangan daerah memanfaatkan sistem informasi seefektif mungkin, olehnya itu dalam kajian ini disamping yang menjadi masalah selain dari sumber daya manusia maka peneliti melihat pada aspek lainnya yaitu akses jaringan untuk menilai bagaimana kualitas layanan yang diberikan oleh badan pengelola keuangan daerah kabupaten biak numfor.

Olehnya itu pada titik permasalahan yang sering terjadi pada pengelolaan keuangan daerah berbasis aplikasi ditemukan adanya jaringan internet yang kurang memadai sehingga optimalisasi penggunaan SIKD belum berjalan dengan baik, hal ini berdasarkan Informasi dengan bapak IAM mengatakan :

“Biasanya kami menunggu waktu istirahat di rumah untuk memproses informasi agensi saat istirahat, yaitu pada malam hari. Karena aplikasi SIKD sering mengalami masalah pada jam kerja produktif dari perangkat komputer atau jaringan internet”

Berdasarkan hasil Informasi diatas dapat dianalisa bahwa kualitas layanan dilihat pada dimensi jaringan internet sangat berpengaruh terhadap optimalisasi penggunaan. Dalam mendukung proses input di SIKD, terkadang juga terjadi gangguan yang menghambat proses input, meskipun dengan cepat kembali normal, disamping itu hal tersebut sangat mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan dan dapat menjadi hambatan dalam pengelolaan keuangan yang secara berkesinambungan akan menimbulkan permasalahan yang serius. Hal ini menunjukkan bagaimana jaringan internet dapat dikatakan tetap terjaga kualitas pelayanannya secara optimal jika mengatur proses kerja sistem SIKD dan salah satu fungsi jaringan adalah untuk izin pengiriman data. sistem informasi keuangan daerah.

4. Kepuasan Pengguna

Hal ini dimaksudkan bahwa dengan membuat informasi lebih mudah diakses oleh masyarakat, badan publik akan terdorong untuk bertindak secara bertanggung jawab dan fokus dalam memberikan pelayanan publik yang sebaik-baiknya. Hal ini dapat terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan sekaligus

mencegah kegiatan-kegiatan terkait korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta menghasilkan pemerintahan yang baik dan bersih. Melalui proses dan penerapan gagasan keterbukaan, tata pemerintahan yang baik, partisipasi masyarakat yang jujur, dan akuntabilitas yang tinggi akan dihasilkan sebagai sarana mewujudkan demokrasi yang sesungguhnya. Dengan memberikan akses informasi kepada masyarakat luas, lembaga-lembaga publik diyakini akan terdorong untuk bertindak secara bertanggung jawab dan berkonsentrasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pemanfaatan terbaik sistem keuangan daerah juga akan bergantung pada kebahagiaan pengguna, atau dalam hal ini pendapat masyarakat dan pegawai.

Berdasarkan informasi dengan bapak MK mengatakan :

“bahwa kami belum merasa puas dalam penggunaan sistem ini, juga masih perlu dilakukan perbaikan terutama pada ketersediaan sarana yang kurang memadai”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa kepuasan pengguna dalam melakukan penggunaan aplikasi sistem informasi keuangan daerah kabupaten biak numfor belum terlihat optimal. hal ini dilihat pada pegawai yang mengatakan bahwa mereka belum merasa puas sebagai pengguna dalam pengelolaan keuangan daerah kabupaten biak numfor, dilihat dari aspek sarana yang mendukung belum maksimal seperti kualitas sistem, kualitas informasi

seperti akses internet dan peralatan komputer yang mendukung optimalisasi dalam penggunaan sistem informasi keuangan daerah kabupaten biak numfor.

Olehnya itu sebagai kesimpulan bahwa kepuasan pengguna sangat mempengaruhi optimalnya penggunaan sistem informasi keuangan daerah kabupaten Biak Numfor terutama dalam peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung, disamping itu perlu diberikan kenyamanan kepada setiap pegawai yang ada terutama pada dukungan kualitas sistem dan kualitas sistem informasi untuk menunjang kinerjanya dalam mengelola keuangan daerah kabupaten biak numfor. Disamping itu perlu dilihat juga berdasarkan respon pegawai dengan fokus berdasarkan pengalaman dalam penggunaan sistem informasi keuangan daerah. Oleh karena itu, sangat penting untuk menggunakan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) sebagai acuan dalam bekerja.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan berkaitan dengan bagaimana penggunaan sistem informasi keuangan daerah pada pemerintahan Kabupaten Biak Numfor bahwa Kualitas Sistem, penggunaan SIKD Pada instansi BPKD Kabupaten Biak Numfor belum berjalan dengan optimal hal ini para pengguna atau pemakai sistem yang ada belum stabil dalam penggunaannya, disamping

itu sumber daya manusia yang dimiliki perlu dibekali dengan pengembangan pengetahuan akan sistem yang ada. Disamping itu sistem yang ada dilihat pada kemudahan penggunaannya masih perlu dibenahi sehingga dapat terintegrasi dengan baik dalam pengelolaan keuangan daerah. Dilihat Kualitas Informasi, dalam penggunaan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) yaitu kelengkapan fasilitas sarana dan akses jaringan yang mendukung kerja pada sistem, dan pada instansi BPKD kabupaten Biak Numfor fasilitas sarana yang mendukung belum memadai sehingga optimalisasi belum tercapai dengan baik. Hal ini mempengaruhi kualitas informasi yang disampaikan tidak akurat bahkan tidak tepat waktu ketika dibutuhkan. Dari segi Kualitas Layanan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) respon yang diberikan oleh pegawai cukup baik hal ini mereka selalu memberikan pelayanan dengan baik dengan respon dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Kemudian, guna mempercepat penyelesaian, kepuasan pengguna sistem informasi keuangan daerah (SIKD) senantiasa mengacu pada SOP pemerintah serta aturan yang ditetapkan menteri keuangan dengan mempertimbangkan keahliannya.

DAFTAR PUSTAKA

Budiriyanto, E. (2013). Kajian Legal Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Disharmonisasi peraturan perundangan. In

*Kementerian Republik Indonesia
Kajian. Kementerian Republik
Indonesia Kajian.*

*Keuangan Daerah Kabupaten
Enrekang. Universitas
Muhammadiyah Makassar.*

- Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Abdul, W. (2021). *Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat (Studi Empiris pada SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah. Stie Nobel Indonesia Makassar.*
- Arma, N. A., Syahfitri, A., & Simon, J. (2023). Implementasi Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Menanggulangi Parkir Liar Di Tepi Jalan Umum Kecamatan Medan Marelان. *Dharmawansa*, 17(April), 922–942.
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik : konsep pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83–88.
- Fedinant, S. A. (2020). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Toraja Utara. Politeknik Stia LAN Makassar.*
- Hanriani. (2019). *Analisis Penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Badan Pengelola*
- Hidayat, asep, & Irvanda, M. (2022). *Optimalisasi Penyusunan dan Pembuatan Laporan untuk Mewujudkan Good Governance. Hospitality* 281, 11(1), 281–290.
- Husrizalsyah, D., & Pramana, A. (2020). Analisis Model Delone And Mc Lean Pada Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah Kota Medan. *Ilmiah MEA (manajemen,Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 4(2), 116–128.
- Krisbintoro Sigit, R., Robi, H. A., Feni, R., & Frida, A. (2020). Optimalisasi Kompetensi Aparatur Sipil Negara Dalam Mendukung Penggunaan Sistem Informasi. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 408–420.
- Moses, M., & Ariadi, W. (2017). Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Pada Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua. *Ekonomi Dan Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura*, 8(1), 85–90.
- Muh Hidayat B. (2022). Pengaruh sistem pengelolaan keuangan terhadap kinerja keuangan daerah melalui implementasi sistem

- akuntansi pada kantor biro umum sekretariat provinsi sulawesi barat. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Muharsyah, A., & Ekawati, R. K. (2022). Analisis Pengaruh Kualitas Informasi, Kualitas Sistem dan Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pengguna Pada Aplikasi Tokopedia Dengan Model Delone And Mclean Di Kota Palembang. *JuSiTik : Jurnal Sistem Dan Teknologi Informasi Komunikasi*, 4(2), 20–27. <https://doi.org/10.32524/jusitik.v4i2.505>
- Pirade, D., Saleh, A. K., Amar, M. Y., Dinas, S., Keuangan, P., & Toraja, K. T. (2013). Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Terhadap Kinerja Pegawai Di Kabupaten Tana Toraja. *Jurnal Analisis*, 2(2), 183–192.
- Rachmawati, S., Retnasari, T., & Sunarto, S. (2018). Optimalisasi Sistem Informasi Perjalanan Dinas Dalam Meningkatkan Efisiensi Biaya Perusahaan. *Jurnal Teknologi Dan Ilmu Komputer Prima (JUTIKOMP)*, 1(2), 87–95. <https://doi.org/10.34012/jutikomp.v1i2.269>
- Rustina. (2018). *Optimalisasi Penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Takalar (Studi Kasus pada Badan Pengelola Keuangan Daerah)*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Wahyuningtyas, N. H. (2018). *Optimalisasi Peran Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Hotel di Kabupaten Tuban (Studi pada Kantor BPPKAD Kabupaten Tuban)*. UNIVERSITAS BRAWIJAYA.
- Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 16 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
- Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara